

Analisis Peran Gender dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah

Adelia Zahra^{1*}, Markum², Febriana Tri Wulandari³

^{1,2,3} Program Studi Kehutanan, Universitas Mataram, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/geoscienceed.v5i3.342>

Article Info

Received: 08 July 2024

Revised: 05 August 2024

Accepted: 08 August 2024

Correspondence:

Phone: +6285338268305

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tingkat keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Aik Bual. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan kuisioner. Penentuan responden menggunakan teknik *simple random sampling*, dengan jumlah responden sebanyak 62 orang, 31 laki-laki dan 31 perempuan, dihitung menggunakan rumus slovin. Analisis data menggunakan *skala likert*, dengan empat tingkat keterlibatan. Berdasarkan hasil penelitian tingkat keterlibatan gender dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dapat dilihat dari 3 aspek yaitu tata kelola kelembagaan dengan tingkat keterlibatan laki-laki cukup terlibat dan tingkat keterlibatan perempuan termasuk kurang terlibat, sedangkan pada aspek tata kelola kawasan laki-laki termasuk kategori cukup terlibat dan perempuan kurang terlibat. Serta untuk aspek terakhir yaitu tata kelola usaha, berada di kategori cukup terlibat untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran gender dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan termasuk cukup terlibat untuk laki-laki dan kurang terlibat untuk perempuan.

Keywords: Peran Gender, Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan Hutan

Citation: Zahra, A., Markum, M., & Wulandari, F. T. (2024). Analisis Peran Gender dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 5(3), 329-336. doi: <https://doi.org/10.29303/geoscienceed.v5i3.342>

Pendahuluan

Perhutanan Sosial menurut Permen LHK No. 9 Tahun 2021 merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Perspektif perhutanan sosial di Indonesia mengakui inisiatif program pemerintah dan inisiatif masyarakat di tingkat lokal, seperti hutan kemasyarakatan (Dewi et al., 2018). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan No 4 Tahun 2023, menjelaskan bahwa Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya dijadikan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.

Rahmina et al., (2012), juga menyebutkan bahwa Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang tujuan utamanya untuk memberdayakan masyarakat lokal, dengan sasaran hutan lindung dan hutan produksi, belum memiliki hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan mereka menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal serta mereka memberikan izin kepada "Kelompok Komunitas Lokal". Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 di tuliskan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

Email: delliaazahr@gmail.com

(IUPHKm) adalah izin usaha yang diberikan untuk kelompok masyarakat setempat agar dapat memanfaatkan hutan pada kawasan lindung dan atau kawasan hutan produksi.

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang telah berhasil dalam menjalankan sistem HKm. Sebagai hasil nyata dari program HKm, masyarakat sekitar hutan dapat merasakan peningkatan dalam pemanfaatan hasil hutan (Markum et al., 2015). Pemanfaatan hutan dalam kebanyakan kasus, tampaknya didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya sedikit yang ikut berperan (Pratama & Rijanta, 2021). Namun di beberapa tempat, perempuan telah banyak memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Mereka cenderung menjual dan mengolah hasil hutan tersebut menjadi gula semut, madu hutan dan lainnya (Lubis et al., 2019). Selain itu, mereka juga mulai meningkatkan kapasitasnya dalam penggunaan teknologi terbaru melalui jejaring yang ada. Laki-laki dan perempuan memiliki peran berbeda dalam pengelolaan hutan, termasuk tata kelola regional, kelembagaan, dan bisnis. Peran-peran tersebut menentukan pekerjaan dan kegiatan yang harus dilakukan dalam mengelola hutan (Pratiwi et al., 2018). Sampai saat ini, peran perempuan dalam pengelolaan hutan masih belum jelas terlihat, sehingga perlu adanya kesetaraan gender dalam mengelola hutan (Pratiwi et al., 2018).

Salah satu dari *Millenium Development Goals* (MDG's) adalah kesetaraan gender. MDG's merupakan komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk mencapai hak asasi manusia. Indonesia merupakan anggota PBB dan turut serta melaksanakan komitmen tersebut untuk mendukung dan mempercepat pencapaian kualitas hidup dan kesetaraan gender (Suwardi, 2010). Kesetaraan gender merupakan persyarat untuk pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat dan merupakan tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 5, yang menyuarakan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua bidang untuk mengurangi diskriminasi yang sering mereka hadapi (Sudirman & Susilawaty, 2022).

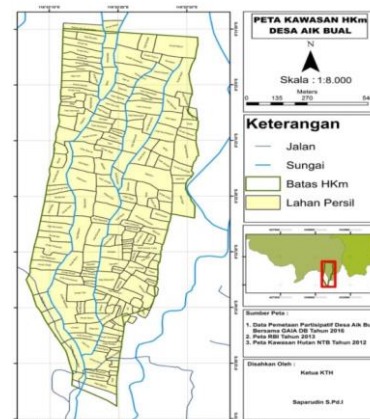
Desa Aik Bual merupakan sebuah desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Rinjani. Hutan yang ada di Desa Aik Bual mendapat penghargaan dari Bank Dunia atas kontribusinya menjaga emisi (Alwiansah et al., 2022). Menurut Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Nusa Tenggara Barat tahun 2016, bahwa Desa Aik bual telah di berikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHKm) seluas 94,45 hektar lahan garapan, dengan 164 orang anggota kelompok

tani yang diberikan izin kelola. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana peran perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Bual.

Metode

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Aik Bual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2024.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Alat dan Bahan Penelitian

Alat

1. Alat Tulis
2. Alat Perekam
3. Kamera

Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa kuisioner yang digunakan untuk mendapatkan data dari responden.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Data yang dilaporkan merupakan data yang diperoleh peneliti apa adanya sesuai dengan kejadian yang sedang berlangsung saat itu (Sugiyono, 2013).

Teknik Penentuan Sampel

Jumlah kelompok tani yang diberikan izin pemanfaatan di kawasan hutan kemasyarakatan Desa Aik Bual sebanyak 164 orang. Untuk menentukan ukuran sampel bisa menggunakan Rumus Slovin (Sugiyono, 2010).

Menurut Arikunto (2000) dalam (Safe'i et al., 2018) jika populasi lebih dari 100 maka batas error yang digunakan adalah 10-15%. Berdasarkan ketetapan batas error yang telah disebutkan maka, batas error yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 % karena lebih menunjang data.

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)} \quad (1)$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Populasi

e = Kesalahan Pengambilan Sampel atau Tingkat Kesalahan (10%)

Maka dari rumus diatas, dapat diperoleh jumlah sampelnya yaitu:

$$n = \frac{164}{1 + (164 \times 0,01^2)}$$

$$n = 62$$

Sampel yang terdiri dari 62 orang, dengan total proporsional 50% antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian sampel untuk laki-laki sebanyak 31 orang dan untuk perempuan sebanyak 31 orang.

Teknik Penentuan Responden

Teknik penentuan responden pada penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling*. Menurut Sugiyono (2012) simple random sampling merupakan metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi secara acak atau sederhana.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. (Sahir & Hafni, 2022). Sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah data yang diperoleh dan hasil yang didapatkan berupa angka.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti data hasil dari wawancara dan kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer seperti informasi dari penelitian sebelumnya, dan dari sumber lainnya (Ayudanti, 2017).

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok yang diteliti secara langsung (Rahmadi, 2011).
2. Wawancara, dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan

bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden (Rahmadi, 2011).

3. Kuisisioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk diisi oleh responden (Rahmadi, 2011).

Analisis Data

Analisis data berupa skala likert, yang dimana skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial (Pranatawijaya et al., 2019).

Selanjutnya dibutuhkan skoring dalam menganalisis data yang didapatkan. Perhitungan skor dilakukan dengan skala pengukuran yang dilakukan sebagai berikut (Sugiyono, 2009)

Tabel 1. Pemberian Skor

Tingkat Keterlibatan	Skor
Keterlibatan Tinggi	4
Cukup Terlibat	3
Kurang Terlibat	2
Tidak Terlibat	1

Untuk memperoleh hasil dari analisis data menggunakan skala likert, maka dikaitkan dengan analisis aspek penelitian dan jumlah pertanyaan yang sudah ditentukan dalam setiap aspek. Dalam hal ini, terdapat empat alternatif jawaban yang telah di berikan nilai atau bobot.

Tabel 2. Interval Skor

Aspek	Jumlah Pertanyaan	Nilai Interval Skor
Kelembagaan	6	6 - 24
Kawasan	6	6 - 24
Usaha	6	6 - 24
Jumlah	18	18 - 72

Untuk menghitung nilai interval skor pada masing-masing aspek, maka menurut sugiyono (2017) dalam Makawekas et al (2016) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Jumlah Alternatif Jawaban}} \quad (2) \\ &= \frac{72 - 18}{4} \\ &= 14 \end{aligned}$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Keterlibatan dalam Pengelolaan HKm

Tingkat Keterlibatan	Interval Nilai
Keterlibatan Tinggi	>60 - 72
Cukup Terlibat	>46 - 60
Kurang Terlibat	>32 - 46
Tidak Terlibat	18 - 32

Sumber: Data Primer (2024, diolah)

Hasil dan Pembahasan Karakteristik Responden

Karakteristik responden dapat berpengaruh pada tingkat keterlibatan gender dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan (Sagita et al., 2019). Responden pada penelitian ini berjumlah 31 orang laki-laki dan 31 orang perempuan, dengan total 62 responden.

Umur Responden

Umur berpengaruh menentukan keahlian atau pengetahuan petani dalam bertani. Selain itu umur mempengaruhi kemampuan kerja seseorang. Petani yang umurnya masih terbilang muda mempunyai keberanian untuk menanggung resiko dalam mencoba inovasi baru (Prasetya & Putro, 2019).

Tabel 4. Umur Responden

No	Interval Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	25 - 35	10	16
2	36 - 45	14	23
3	46 - 55	28	45
4	56 - 65	8	13
5	66 - 75	2	3
Jumlah		62	100

Sumber: Data Primer (2024, diolah)

Menurut tabel 4, menunjukkan bahwa kisaran umur responden paling banyak berada di antara umur 46 - 55 tahun, dengan persentase 45%. Usia tersebut masih berada pada angka yang produktif. Moroki et al., (2018) mengemukakan bahwa usia produktif untuk bekerja adalah 15-55 tahun. Pada usia produktif, motivasi dalam bekerja cenderung lebih tinggi, begitu juga kemampuan dan keterampilannya dalam bekerjapun masih baik. Ada juga petani dengan usia non produktif (lansia) masih bertani, karena mereka merasa masih kuat dan harus bekerja untuk memperoleh penghasilan (Dewi et al., 2018).

Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan salah satu usaha yang di tempuh manusia atau masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan seseorang dalam mengembangkan diri (Prasetya & Putro, 2019). Pendidikan sangat menentukan tingkat kompetensi petani dalam melakukan kegiatan pertanian.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	17	27
2	SD	33	54
3	SMP	2	3
4	SMA	8	13
5	S1	2	3
Jumlah		62	100

Sumber: Data Primer (2024, diolah)

Sebanyak 33 orang responden dengan persentase 54% hanya menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena terhalang biaya dan keinginan mereka untuk langsung bekerja agar mendapatkan penghasilan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bekerja di sektor pertanian atau non pertanian. Menurut Werembinan et al., (2018) semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin banyak wawasan yang dimiliki, sehingga banyak pertimbangan untuk memilih suatu pekerjaan.

Pekerjaan Responden

Pekerjaan di lahan pertanian tidak menuntut petani untuk setiap hari berada di lahan miliknya. Petani dapat memanfaatkan waktu luang dengan bekerja di sektor lain jika masih ingin menambah pendapatan (Dewi et al., 2018). Jenis pekerjaan masyarakat yang berada di sekitar hutan kemasyarakatan Aik Bual sangat beragam.

Tabel 6. Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan Responden	Persentase Laki-laki (%)	Persentase Perempuan (%)
1	Petani	55	61
2	Peternak	16	10
3	Petani dan Peternak	19	29
4	Guru Honorar	6	0
5	Pengawas BKD	3	0
Total		100	100

Sumber: Data Primer (2024, diolah)

Jenis pekerjaan utama dari responden yang berada di sekitar hutan kemasyarakatan Aik Bual adalah sebagai petani. Sektor pertanian masih menjadi andalan penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar dari tahun ketahun (Mohammad & Mublihatin, 2021).

Luas Lahan

Menurut Moroki et al., (2018) luas lahan garapan sangat mempengaruhi pendapatan para petani, semakin luas lahan yang dikelola maka akan berdampak pada hasil produksi yang optimal dari petani.

Tabel 7. Luas Lahan Garapan

No.	Kategori	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sempit	0,1 - 0,5	33	53
2.	Sedang	0,6 - 1,0	22	35
3.	Luas	> 1,0	7	11
Total Responden			62	100

Sumber: Data Primer (2024)

Berdasarkan hasil penelitian, total luas lahan secara keseluruhan dari semua responden sebesar 39 Ha. Artinya rata-rata dari mereka memiliki hak kelola lahan HKm sebesar 0,6 Ha perorang. Namun, berdasarkan data penelitian sebanyak 33 orang atau 53% responden memiliki luas lahan yang dikategorikan sempit.

Luas lahan garapan yang sempit akan menyebabkan kecilnya pendapatan petani serta intensitas waktu untuk pergi ke lahan akan lebih sedikit atau cenderung lebih cepat (Abdurachman et al., 2015). Bagi mereka yang memiliki lahan yang sempit biasanya itu didapatkan dari hasil pembagian yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan untuk mereka yang memiliki luas lahan yang luas biasanya melakukan kegiatan pemindahtanganan lahan dari orang lain, sehingga lahan yang mereka kelola menjadi luas.

**Tingkat Keterlibatan Gender
Tata Kelola Kelembagaan**

Kegiatan tata kelola kelembagaan biasanya ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti pertemuan kelompok secara rutin untuk mengetahui saran dan masukan dari setiap anggota, serta adanya pembahasan terkait pembuatan awig-awig, dan lainnya

Tabel 8. Tingkat Keterlibatan Gender dalam Tata Kelola Kelembagaan

No.	Keterlibatan	Nilai Skor	Persentase Laki-laki (%)	Persentase Perempuan (%)
1	Keterlibatan Tinggi (KtT)	21 - 24	13	0
2	Cukup Terlibat (CT)	16 - 20	58	6
3	Kurang Terlibat (KT)	11 - 15	23	65

Tidak Terlibat (TT)	6 - 10	6	29
Jumlah		100	100

Sumber: Data Primer (2024, diolah)

Tingkat keterlibatan gender pada tata kelola kelembagaan tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tingkat keterlibatan laki-laki termasuk kedalam kategori cukup terlibat dengan persentase 58%, sedangkan tingkat keterlibatan perempuan termasuk kurang terlibat pada nilai 65%. Hal ini karena pihak laki-laki maupun pihak perempuan memiliki kesadaran yang sedikit tentang pentingnya kelembagaan dalam menjalankan sebuah kelompok, di samping itu dalam kepengurusan kelompok pihak laki-laki lebih dilibatkan menjadi anggota inti maupun struktur keanggotaan yang lain, sedangkan pihak perempuan hanya menjadi anggota biasa.

Selain itu pihak perempuan hanya akan menghadiri kegiatan kelompok apabila ada anggota perempuan lain yang ikut, maksudnya mereka hanya hadir apabila ada agenda yang menurut mereka penting. Namun ada beberapa anggota yang kurang mendapatkan informasi dalam hal pertemuan kelompok, karena mereka hanya sibuk mencari tambahan pendapatan.

Tata Kelola Kawasan

Biasanya dalam tata kelola kawasan diatur bagaimana lahan tersebut bisa dikelola dengan baik. Ada 6 aspek dalam tata kelola kawasan yaitu persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian hama, pemanenan dan pengangkutan hasil panen. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari adanya keterlibatan laki-laki dan perempuan.

Tabel 9. Tingkat Keterlibatan Gender dalam Tata Kelola Kawasan

No.	Keterlibatan	Nilai Skor	Persentase Laki-laki (%)	Persentase Perempuan (%)
1	Keterlibatan Tinggi (KtT)	21 - 24	23	0
2	Cukup Terlibat (CT)	16 - 20	65	52
3	Kurang Terlibat (KT)	11 - 15	10	45
4	Tidak Terlibat (TT)	6 - 10	3	3
Jumlah			100	100

Sumber: Data Primer (2024, diolah)

Tingkat keterlibatan gender pada tata kelola kawasan bahwa laki-laki dan perempuan berada pada kategori cukup terlibat dengan nilai persentase sebesar

65%, sedangkan tingkat keterlibatan perempuan dengan nilai 52%.

Pada tata kelola kawasan memerlukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk membuat pengelolaan kawasan berjalan dengan baik. Terutama di kegiatan pemeliharaan tanaman, hal ini bertujuan untuk menghasilkan tanaman yang baik pada saat akan dipanen nantinya. Namun pada kegiatan persiapan lahan, perempuan tidak dilibatkan atau mereka tidak mau terlibat, dan tentunya pihak laki-laki yang menjalankan kegiatan tersebut.

Tata Kelola Usaha

Tata kelola usaha merupakan upaya untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui sumber daya yang dimiliki berupa pengolahan hasil menjadi suatu produk. Dalam tata kelola usaha, biasanya masyarakat akan belajar bagaimana mensejahterakan keluarga dengan mengelola hasil hutan yang ada, dengan tetap mempertahankan aspek kelestarian hutan.

Tabel 10. Tingkat Keterlibatan Gender dalam Tata Kelola Usaha

No.	Keterlibatan	Nilai Skor	Persentase Laki-laki (%)	Persentase Perempuan (%)
1	Keterlibatan Tinggi (KfT)	21 - 24	10	16
2	Cukup Terlibat (CT)	16 - 20	48	45
3	Kurang Terlibat (KT)	11 - 15	35	39
4	Tidak Terlibat (TT)	6 - 10	6	0
Jumlah			100	100

Sumber: Data Primer (2024, diolah)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat keterlibatan laki-laki dan perempuan pada tata kelola usaha memiliki tingkat keterlibatan yang sama. Untuk tingkat keterlibatan laki-laki pada tata kelola usaha termasuk cukup terlibat dengan nilai 48%, begitu juga dengan tingkat keterlibatan perempuan termasuk cukup terlibat dengan nilai 45%. Hal ini dapat terjadi karena dalam kegiatan tata kelola usaha rata-rata masyarakat di sekitar HKm Aik Bual lebih memilih untuk langsung menjual hasil panen dari lahan garapannya kepada pengepul atau langsung memasarkannya sendiri ketempat-tempat terdekat. Disamping itu untuk pengolahan produk, pihak laki-laki maupun perempuan hanya terlibat dalam mengolah aren menjadi gula. Mereka lebih memilih langsung memasarkan hasil HKm daripada harus

mengolahnnya menjadi sebuah produk, karena kebutuhan ekonomi yang menuntut mereka harus menjual langsung hasil hutan tersebut seperti kopi, durian, alpukat, manggis, dan tumbuhan bawah seperti paku-pakuan.

Tingkat Keterlibatan Gender dalam Tiga Aspek Pengelolaan HKm

Keterlibatan gender dalam pengelolaan HKm dibagi menjadi tiga aspek, yaitu tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan, dan tata kelola usaha. Dalam ketiga aspek tersebut sudah dijelaskan masing-masing tingkat keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam mengelola HKm.

Tabel 11. Tingkat Keterlibatan Gender dalam Tiga Aspek Pengelolaan HKm

No.	Keterlibatan	Nilai Skor	Persentase Laki-laki (%)	Persentase Perempuan (%)
1	Keterlibatan Tinggi (KfT)	>60 - 72	0	3
2	Cukup Terlibat (CT)	>46 - 60	87	23
3	Kurang Terlibat (KT)	>32 - 46	10	68
4	Tidak Terlibat (TT)	18 - 32	3	6
Jumlah			100	100

Sumber: Data Primer (2024, diolah)

Berdasarkan hasil, tingkat keterlibatan laki-laki pada pengelolaan HKm termasuk cukup terlibat, dengan nilai 87%. Artinya bahwa pihak laki-laki mengetahui dan merasakan adanya manfaat dari HKm yang ada di Aik Bual, selain itu mereka juga memiliki kesadaran untuk menjaga lahan kelola yang mereka miliki agar mereka bisa merasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu contohnya pada saat melakukan penanaman, mereka meminta untuk menanam lahan yang mereka kelola dengan jenis tanaman berkayu maupun bukan kayu. Selain untuk mendapatkan manfaat ekonomi, mereka juga sekaligus meningkatkan manfaat ekologi hutan dengan meningkatnya tutupan hutan. HKm Aik Bual memiliki kelembagaan yang membantu dalam mejalankan pengelolaan hutan. Namun dalam pelaksanaannya pihak laki-laki terlibat lebih aktif daripada pihak perempuan.

Keterlibatan pihak perempuan dalam mengelola HKm termasuk ke dalam kategori kurang terlibat dengan nilai 68%. Hal ini disebabkan karena pihak perempuan kurang mendapatkan informasi tentang cara pengelolaan HKm. Mengingat rata-rata pendidikan mereka hanya sampai jenjang Sekolah

Dasar (SD), menurut mereka pendidikan yang rendah menjadi faktor yang menyebabkan mereka mengelola HKm dengan cara yang sama seperti turun temurun dari keluarga mereka. Pihak perempuan cenderung lebih mementingkan mengelola hasil HKm agar mendapatkan hasil secara ekonomi, namun mereka tidak memikirkan bagaimana cara merawat lahan mereka agar bisa dimanfaatkan dalam jangka yang panjang. Selain itu pihak perempuan lebih memilih untuk mengurus keluarga dibandingkan ikut terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan menjaga atau mengelola HKm. Pemikiran seperti inilah yang diterapkan oleh pihak perempuan sehingga mereka jarang ikut terlibat, terutama dalam kegiatan tata kelola kelembagaan. Hal ini di karenakan apabila terjadi suatu masalah dalam pengelolaan HKm, pihak perempuan menganggap diri mereka kurang mampu dalam mengambil keputusan atau tindakan apa yang harus diambil dalam kelompok.

Peran aktif laki-laki dan perempuan dalam mengelola HKm tentunya akan membawa dampak yang positif bagi kesejahteraan mereka. Selain itu adanya kelompok tani yang terbentuk dapat membantu mereka dalam mengembangkan pengetahuan ataupun keterampilan dalam mengelola hutan. Partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pemanfaatan hutan secara lestari sangat dibutuhkan, untuk membantu memberdayakan kehidupan mereka (Witno et al., 2020).

Kesimpulan

Peran dan tingkat keterlibatan gender dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dibagi menjadi 3 aspek yaitu Tata kelola kelembagaan, dalam tata kelola kelembagaan tingkat keterlibatan laki-laki termasuk kedalam kategori cukup terlibat dengan persentase 58%, sedangkan tingkat keterlibatan perempuan termasuk kurang terlibat pada nilai 65%. Kedua ada tata kelola kawasan, dalam hal ini dapat diketahui bahwa keterlibatan laki-laki pada tata kelola kawasan berada pada kategori cukup terlibat dengan nilai persentase sebesar 65%, sedangkan tingkat keterlibatan perempuan termasuk cukup terlibat dengan nilai 52%, dan yang terakhir tata kelola usaha, dalam hal ini tingkat keterlibatan laki-laki dan perempuan pada tata kelola usaha memiliki tingkat keterlibatan yang sama yaitu termasuk cukup terlibat. Dengan nilai 48% untuk keterlibatan laki-laki sedangkan tingkat keterlibatan perempuan dengan nilai 45%.

Tingkat keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek pengelolaan HKm berada pada nilai 87% atau termasuk cukup terlibat untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan termasuk kurang terlibat dengan nilai 68%

Referensi

- Abdurachman, D., Andung Rokhmat, H., & Setiawan, H. I. (2015). Hubungan luas garapan hutan rakyat dengan pendapatan petani (Kasus pada Kelompok Tani Alam Raya Desa Pamedaran Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes). *Jurnal Agrijati*, 28(1), 35–44.
- Alwiansah, M. R., Damayanti, S. P., & Martayadi, U. (2022). Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Wisata Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. *Journal Of Responsible Tourism*, 2(1), 163–168.
- Ayudanti, K. (2017). Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Konsumsi Masyarakat Menurut perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat). *Universitas Negeri Raden Intan Lampung*, 1–104.
- Dewi, I. N., Awang, S. A., Andayani, W., & Suryanto, P. (2018). Karakteristik Petani dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terhadap Pendapatan Petani di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 12 (1), 86.
- Lubis, R. S., Kaskoyo, H., Febryano, I. G., & Bakri, S. (2019). Kontribusi Wanita Tani Hutan Terhadap Pendapatan Keluarga di Hutan Rakyat Desa Air Kubung Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2), 186.
- Markum, Setiawan, B., & Sabani, R. (2015). *Hutan Kemasyarakatan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Potret Dua Dasawarsa Praktek Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. RA Visindo.
- Mawakes N., Pangemanan L.R., & Memah M. (2016). Dinamika Kelompok Tani Cempaka di Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken Kota Manado. *Jurnal Unsrat*. 7 (3), 1 -14.
- Mohammad, S., & Mublihatin, L. (2021). Kontribusi Pekerjaan Sampingan Petani Terhadap Ekonomi Rumah Tangga di Desa Pakong Kecamatan Pakong, Pamekasan. *Jurnal Pertanian Cemara*, 18, 87–90.
- Moroki, S., Masinambow, V. A. J., & Kalangi, J. B. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Di Kecamatan Amurang Timur. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 132–142.
- Pranatawijaya, V. H., Widiatry, W., Priskila, R., & Putra, P. B. A. A. (2019). Penerapan Skala Likert dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online. *Jurnal Sains dan Informatika*, 5(2), 128–137.

- Prasetya, N. R., & Putro, S. (2019). Hubungan Tingkat Pendidikan dan Umur Petani dengan Penurunan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Nadya. *Edu Geography*, 7(1), 47-56.
- Pratama, A. C., & Rijanta, R. (2021). Pengelolaan Berbasis Gender Pada Hutan Kemasyarakatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Legal Reasoning*, 3(2), 80-99.
- Pratiwi, W., Markum, & Setiawan, B. (2018). Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Dongo Baru Kabupaten Lombok Timur. *Universitas Mataram*, 1-11.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Banjarmasin.
- Rahmina, Sofia, Y., Marbyanto, E., & Mustofa, A. (2012). *Tata Cara dan Prosedur pengembangan Program pengelolaan hutan berbasis masyarakat* (2 ed., Nomor 41). Forclime Press. Jakarta.
- Safe'i, R., Febryano, G. I., & Aminah, L. N. (2018). Pengaruh Keberadaan Gapoktan Terhadap Pendapatan Petani dan Perubahan Tutupan Lahan di Hutan Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(2), 109-114.
- Sahir, & Hafni, S. (2022). *Metodelogi Penelitian*. KBM Indonesia. Yogyakarta.
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) : Suatu Reviuw Literatur Sistematis. *Journal Publicuho*, 5(4), 995-1010.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV : Alfabeta. Bandung.
- Suwardi, M. (2010). *Analisis Gender dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat dan Kontribusi Hutan Rakyat terhadap Pendapatan Rumah Tangga (Kasus Hutan Rakyat di Desa Sukaresmi , Kecamatan Sukaresmi , Kabupaten Cianjur , Jawa Barat)*. Institut Pertanian Bogor.
- Werembinan, C., Caroline B.D., & Lyndon R.J. (2018). Persepsi Generasi Muda Terhadap Kegiatan Pertanian di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jurnal Unsrat*. 14(3).